



Digitalisasi Bukti Setoran Pajak Daerah di Kantor BPKD Aceh Barat

Maulia Thahara Putri, Sri Wahyu Handayani

Universitas Teuku Umar, .AluePeumayareng, Ujong Tanoh Darat, Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681

ARTICLE INFORMATION

Received: November 21, 2021
 Revised: Desember 10, 2021
 Accepted: Desember 30, 2021
 Available online: January 31, 2022

KEYWORDS

Kata Kunci: Pajak Daerah, Digitalisasi

CORRESPONDENCE

Phone: +6285276257450
 E-mail: mauliathaharaputri@gmail.com

A B S T R A C T

The purpose of this study was to analyze the digitization of proof of regional tax payments at the Regional Financial Management Agency (BPKD) of West Aceh Regency. The method used in this research is a descriptive qualitative research method which explains the phenomenon of the findings in the field in depth. This research was conducted at the Regional Financial Management Agency, which is located at Jalan Gajah Mada, the office complex of the Regent of Aceh Barat. The results of the study indicate that the implementation of the design of digitizing proof of regional tax payments at the BPKD Office of West Aceh Regency is still in the form of discourse or planning. Then the level of the problem that is obtained is the absence of professional staff or special officers who have been appointed/appointed as the person in charge at the BPKD Aceh Barat Office with regard to the management of the digitalization application that is being planned. The results of this study are suggested to the relevant agencies in order to further speed up the process of designing the digitization of local tax deposit receipts so as to make it easier for taxpayers if they lose proof of tax payments, whether it is proof of tax payments in that year or in previous years.

PENDAHULUAN

Digitalisasi adalah metode yang kompleks dan fleksibel yang menjadikannya konten utama kehidupan manusia. Teori digital merupakan sebuah konsep untuk memahami perkembangan zaman ilmu pengetahuan dan teknologi, dari manual ke otomatis dalam segala hal, rumit hingga ringkas dalam segala hal. Apalagi sekarang era teknologi digital sudah dimulai (Aji, 2016). Semua aktivitas pada saat ini dikendalikan oleh teknologi, semua aktivitas manusia dikendalikan oleh kematangan teknologi. Segala kegiatan yang tidak menggunakan tenaga manusia atau manual itu disebut dengan teknologi digital. Namun, cenderung memiliki sistem komputerisasi atau sistem operasi otomatis dalam format yang dapat dibaca oleh komputer (A.S., Rosa dan Shalahuddin, 2016).

Pajak daerah sebagai salah satu penerimaan daerah merupakan salah satu penopang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keberadaan dari pajak daerah merupakan salah satu dari sumber pendapatan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh karena itu, rekonsiliasi terhadap penerimaan tersebut dilakukan guna menggali potensi dan kendala terhadap penerimaan daerah. Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak yang dibayarkan oleh seseorang atau badan kepada daerah

menurut undang-undang, yang tidak menerima imbalan secara langsung dan digunakan di daerah-daerah yang paling makmur dari rakyat. Oleh karena itu, kebijakan penguatan pajak selalu berada di bawah kendali publik, dan tidak ada imbalan langsung berimbang yang dapat dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendanai pengelolaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pengelolaan dokumen administrasi perpajakan merupakan suatu pekerjaan yang memproses pengelolaan dan arsip dokumen mengenai administrasi perpajakan, misalnya surat setor pajak dan bukti potong pajak. Dokumen ini sangat berguna bagi para wajib pajak, baik untuk pihak bendahara BPKD Aceh Barat maupun penyedia atau pihak ketiga yang pengambilan dokumennya diwakilkan oleh unit kerja/pejabat pembuat komitmen yang bersangkutan (Donni, 2015).

Kantor BPKD Aceh Barat pada saat ini belum adanya databes yang berupa folder khusus yang menyimpan data setoran pajak, yang mana penanganan dari bukti setoran pajak masih manual, yaitu selain tidak tersistem secara baik dan juga memerlukan banyak tenaga untuk proses pengerjaannya.

Selain itu tingkat permasalahan yang terjadi saat ini adalah masih banyaknya pegawai laai dalam melengkapi surat bukti pajak orang lain, baik usaha maupun perorangan, dijumpai

banyak kesalahan, disamping boros waktu, boros materi, dan boros tenaga. Dalam mengatasi keadaan tersebut kantor BPKD Kabupaten Aceh Barat saat ini sedang merancang atau membangun digitalisasi mengenai bukti Setoran pajak, sehingga apabila sewaktu-waktu diperlukan bukti tersebut dapat di tunjukkan. Hal ini sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahayu, Sri, dan Ita Salsalina Lingga (2009) Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Wajib Pajak Badan oleh Kpp Pratama Bandung), beliau mengatakan bahwa sistem administrasi perpajakan modern juga mengikuti kemajuan teknologi berbasis sistem elektronik. Layanan seperti *e-filing*, *e-payment* dan *e-registration*, yang diharapkan dapat meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif dan didukung dengan penerapan kode etik pegawai tata kelola yang baik, merupakan tujuan dari program modernisasi ini, yang menerapkan perpajakan yang transparan dan bertanggung jawab, menggunakan sistem informasi teknis modern dan penerusan sebagai referensi. Perubahan yang mendasar dan revolusioner akan menjadi terobosan-terobosan yang telah atau sedang berlangsung dalam pelayanan perpajakan (Rahayu & Lingga, 2009). Digitalisasi dapat sepenuhnya mendukung kepatuhan wajib pajak melalui kerjasama semua pihak, baik dari KPP Pratama yang melakukan sosialisasi, maupun melalui penyadaran wajib pajak tanpa sanksi terlebih dahulu karena juga akan merugikan wajib pajak itu sendiri (Denis, 2009).

METODE

Metode yang peneliti lakukan dalam penelitian ini bersifat kualitatif atau bisa disebut dengan metode penelitian naturalistik, karena dilakukan pada kondisi yang alamiah yaitu penelitian yang berdasarkan data deskriptif baik itu berupa tulisan maupun lisan orang-orang serta perilaku yang diamati dengan menggunakan teknik pengambilan *purposive sampling*.

Demi untuk menemukan data yang akurat untuk dapat mengamati serta memahami subjek maupun hal yang berkaitan dengan masalah yang di teliti dengan begitu peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang memberikan pemahaman berdasarkan metodologi yang bersifat menyelidiki suatu fenomena sosial yang ada dalam masyarakat.

Sehubungan dengan penelitian ini, metode yang digunakan adalah pendekatan *post-positivis*. Menurut (Creswell, 2014), pendekatan *post-positivis* adalah metode yang menyimpang dari teori, kemudian peneliti melakukan kegiatan pengumpulan data untuk mendukung/membantah teori tersebut, dan memperbaiki hasil penelitian berdasarkan hasil penelitian. Selain itu, ditinjau dari jenis penelitiannya, penelitian ini dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: 1) jenis penelitian berbasis tujuan, yaitu penelitian deskriptif; 2) jenis penelitian berbasis minat, yaitu penelitian murni; 3) penelitian jenis dibagi berdasarkan waktu, yaitu, studi *cross-sectional* yang dilakukan dari Maret 2021 hingga Juli 2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan arsip berbasis digital dalam sebuah badan merupakan hal penting karena dapat memberikan informasi penting bagi badan tersebut. Tahapan perancangan terhadap suatu aplikasi dilakukan setelah tahapan analisis di lakukan, karena analisis terhadap suatu sistem dilakukan untuk mengetahui alasan mengapa sistem tersebut diperlukan,

merumuskan kebutuhan-kebutuhan dari sistem tersebut untuk mereduksi sumber daya yang berlebih serta membantu merencanakan penjadwalan pembentukan sistem, meminimalisir distorsi-distorsi yang mungkin terdapat didalam sistem tersebut sehingga fungsi yang terdapat di dalam sistem tersebut bekerja secara optimal.

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Kasubag Perencanaan Dinas BPKD, beliau mengatakan bahwa banyak sekali persoalan-persoalan yang didapatkan diantaranya adalah masih banyaknya pegawai lalai dalam merekap bukti setoran pajak, tidak adanya rekapitulasi yang baik dalam hal bukti pajak, belum terkontrolnya anggaran fotokopi bukti pajak setoran pajak. Selain itu, sulitnya menemukan kembali data bukti setoran pajak tahun lalu apabila sewaktu-waktu kita memerlukan sebagai barang bukti bagi yang bersangkutan. Oleh karena itu, kita memerlukan sebuah aplikasi yang memudahkan kita dalam kegiatan rekapitulasi bukti setoran pajak masyarakat. Pelaksanaan perancangan digitalisasi pada Kantor BPKD Kabupaten Aceh Barat menurut beliau masih bersifat wacana atau perencanaan. Namun dalam hal ini digitalisasi bukti setoran pajak akan dilaksanakan pada tahun ini (2021) dan akan dioperasikan pada awal tahun 2022 hal ini disebabkan karena belum adanya penunjukkan petugas khusus untuk menangani digitalisasi ini. Petugas yang ditunjuk merupakan salah satu staf/pegawai pada kantor DPKD dengan bidang yang bersangkutan dengan sistem kerja pengimputan setiap hari. Kemudian beliau menambahkan bahwa Perancangan aplikasi ini disusun untuk memudahkan menemukan kembali bukti setoran pajak. Rencananya digitalisasi bukti setoran pajak ini akan di buat dalam bentuk Folder sebanyak 50 folder file sesuai dengan jumlah SKPD dan para wajib pajak, kemudian setiap folder berisi jenis-jenis wajib pajak seperti pajak makan minum (PB.1) pajak galian C, pajak air dan tanah, pajak burung walet, pajak reklame, pajak hotel, pajak hiburan dan pajak lainnya.

Disisi lain peneliti juga melakukan wawancara dengan bendahara penerimaan Kantor BPKD beliau mengatakan bahwa tentang perancangan bukti setoran itu memang sudah pernah di bahas sebelumnya namun untuk proses pelaksanaannya beliau tidak mengetahui sudah terencanakan atau belum, karena segala hal yang menjadi wacana dan yang ingin direncanakan atau dirancang di Kantor BPKD merupakan ranah kerja Kasubag perencanaan kami hanya mengetahui apabila hal tersebut telah terealisasi atau kami hanya sebagai pelaksana saja. Untuk wacana digitalisasi bukti setoran pajak menurut saya sangat bagus. Dengan adanya digitalisasi otomatis data akan tersimpan dengan baik dan akan memudahkan bagi bendahara penerima dan para wajib pajak dalam pencarian kembali data tersebut jika sewaktu-waktu diperlukan kembali. Namun, dalam kaitan ini digitalisasi juga memiliki kelemahan tersendiri, salah satunya adalah virus komputer, dimana jika data tersebut terkena virus maka data tersebut akan hilang, maka dari itu kita juga harus menyediakan hardis kusus untuk *file* data tersebut, kemudian dari sisi pemegang tanggungjawabnya juga menjadi kendala, karena selaku penanggungjawab harus berkerja lembur atau ekstra dalam pengimputan data. Hal ini disebabkan karena data diinput setelah jam kerja selesai.

Disisi lain, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat yang sedang melakukan pembayaran pajak di kantor BPKD Aceh Barat. Mereka mengatakan bahwa jika misalnya bukti setoran pajak ini didigtalkan, maka kami

sangat mendukung, dan kami berharap untuk sesegera mungkin dilakukan, mengingat banyak permasalahan yang sering kami alami seperti kehilangan bukti setoran pajak tersebut. Ketika kami meminta kembali, mereka harus mencari terlebih dahulu dan memerlukan waktu yang cukup lama, karena mereka harus membuka map satu persatu yang telah mereka susun, dan apabila kehilangan bukti setoran pajak pada 5 tahun yang lalu maka akan sangat sulit untuk di dapatkan karena bukti tersebut telah dipindahkan ke dalam gudang, sehingga sangat sulit dan membutuhkan waktu yang lama untuk di cari kembali, dan itu menjadi salah satu kendala bagi kami apabila ingin mengurus izin usaha atau lain sebagainya. Dengan begitu ide tersebut sangat bagus untuk di terapkan agar lebih efektif pencairan dalam pencairan bukti setoran pajak yang telah hilang.

Kemudian berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan menunjukkan bahwa digitalisasi bukti setoran pajak daerah di kantor BPKD Aceh Barat, bukti setornya pajak berupa kertas. Kertas itu akan hilang sewaktu-waktu dan apabila dibutuhkan kembali oleh si pemilik pajak maka akan sulit proses pencariannya. Misalnya, bukti setoran tahun 2015 ketika di minta kembali pada tahun 2019 atau 2020 otomatis bukti itu sudah di gudangkan sehingga memerlukan waktu yang lama dalam proses pencariannya. Maka dari itu digitalisasi bukti setoran pajak sangat penting untuk segera dibuat pada kantor BPKD Aceh Barat.

Beberapa permasalahan dibagian perpajakan yang telah penulis identifikasi menunjukkan bahwa, pada pelaksanaan aktualisasi, terdapat satu isu yang telah diangkat atau di paparkan yaitu kurang optimalnya penyimpanan dokumen surat setor pajak dan bukti setoran pajak.

Berdasarkan analisis diatas, sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sukirno (2007) yang berpendapat bahwa pengelolaan pajak dapat memberikan kontribusi penting lainnya dalam meningkatkan penerimaan negara. Untuk meningkatkan efisiensi pemungutan dan pengelolaan pajak, kegiatan pemungutan dan pengelolaan harus disesuaikan dengan kondisi setempat. Dalam hal ini diperlukan koordinasi antara perumusan struktur perpajakan dengan pemungutan dan pengelolaan pajak. Struktur perpajakan harus dapat diterapkan secara efektif secara administratif dan mencapai tujuan yang diharapkan. Struktur pajak yang sulit dikelola tidak akan memberikan penerimaan pajak yang diharapkan.

Kemudian hal ini sebagaimana pendapat Sofiyana *et al.*, (2019) mengatakan bahwa digitalisasi pajak merupakan sebuah program sebagai bentuk pelaksanaan dari reformasi perpajakan yang merupakan perbaikan atau penyempurnaan kinerja dan kelembagaan agar lebih efisien dan ekonomis (Sofiyana *et al.*, n.d.). Menurut Kaarawy (2018), suatu sistem pelaporan pajak dari format pengarsipan kertas analog menjadi format digital dan daring di sebut dengan digitalisasi pajak dalam (Wardhani *et al.*, 2020). Sedangkan Isyriin berpendapat bahwa pajak atas perusahaan yang memanfaatkan teknologi internet dalam melaporkan pajaknya disebut dengan digitalisasi pajak (Isyriin, 2019) Untuk menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yaitu salah satunya dengan pemerintah menunjukan kinerja nyata mereka kepada masyarakat dengan begitu akan tumbuhnya rasa percaya dari masyarakat kepada pemerintah (Latief *et al.*, 2020). Latief *et al.* mengemukakan bahwa, melalui pengoperasian yang baik serta pelayanan yang

diberikan kepada pemerintah dapat menimbulkan rasa kepercayaan dari rakyat kepada pemerintah.

Disisi lain adapun dampak kegiatan aktualisasi dalam rangka digitalisasi dokumen surat setoran pajak dan bukti setoran pajak tahun 2021 pada BPKD Aceh Barat yaitu : 1) mempermudah pencarian data dokumen surat setor pajak dan bukti potong pajak. 2) hampir meniadakan resiko kehilangan data, ataupun kerusakan data. 3) memudahkan para wajib pajak jika sewaktu-waktu mereka kehilangan surat setor pajak.

Namun dampak jika bukti setoran pajak tidak di gitalisasi yaitu : 1) dokumen surat setor pajak dan bukti potong pajak akan tetap tidak tersusun dan tetap menyulitkan proses pencarian. 2) besarnya kerentanan kerusakan dokumen. 3) proses pencarian dokumen pajak memerlukan waktu yang lama.3) tertundanya pekerjaan yang lain disebabkan lamanya proses pencarian dokumen.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi sebuah kebijakan yang dilakukan oleh kan BPKD Aceh Barat sudah sangat mendukung dalam proses percepatan pembangunan daerah dalam hal ini adalah digitalisasi perpajakan. Menurut teori yang di kemukakan oleh Sedianingsih, F. (2010) Fokus program reformasi perpajakan ini adalah perbaikan sistem dan manajemen SDM, dan direncanakan perubahan yang dilakukan sifatnya lebih menyeluruh. Hal ini perlu dan mendesak untuk dilakukan, karena disadari bahwa elemen yang terpenting dalam suatu sistem organisasi adalah manusianya. Secanggih apapun struktur, sistem, teknologi informasi, metode dan alur kerja suatu organisasi, semua ini tidak dapat berjalan dengan optimal tanpa didukung dengan SDM yang capeble dan berintegritas. Harus disadari bahwa yang perlu dan harus diperbaiki sebenarnya adalah sistem dan manajemen SDM, bukan semata-mata merasionalisasi pegawai, karena sistem yang baik dan terbuka dipercaya akan bisa menghasilkan SDM yang berkualitas (Sedianingsih, 2010).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Digitalisasi Bukti Setoran Pajak Daerah di Kantor BPKD Aceh Barat dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan perancangan digitalisasi pada kantor BPKD Kabupaten Aceh Barat masih bersifat wacana atau perencanaan. Kemudian belum adanya kelengkapan penunjang seperti alat scanner bukti setoran pajak, serta belum adanya tenaga profesional di Kantor BPKD Aceh Barat bekenaan dengan pengelolaan aplikasi digitalisasi yang sedang direncanakan.

Saran

Dari segala kendala dan permasalahan yang ditemui, tentang Digitalisasi Bukti Setoran Pajak Daerah di Kantor BPKD Aceh Barat yang dibahas, dirasa masih sangat jauh dari sempurna, maka dari itu diberikan saran sebagai berikut :

1. Pengelolaan mengenai arsip dan data digital harus dilakukan Secepat Mungkin. Dengan begitu diharapkan agar terhindar penumpukan dokumen-dokumen pajak,, sehingga dokumen-dokumen yang sudah selesai dikerjakan dan dilaporkan bisa segera diarsipkan dan disimpan.
2. Diharapkan adanya tenaga profesional di kantor BPKD Aceh Barat bekenaan dengan pengelolaan aplikasi digitalisasi yang sedang direncanakan.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Ibuk Sri Wahyu Handayani, S.AP.MA Selaku Dosen Pembimbing lapangan selama mengikuti program magang yang telah memberikan saya arahan dan bimbingan dalam menyusun dan menyelesaikan Karya Ilmiah ini sebagai syarat kelulusan Strata Satu (S1).
2. Bapak Rudy Irawan, S.E, Bapak Aris Trian, Kepada Ibu Cut Nurmaliah SE.AK Selaku pegawaikantor BPKD Aceh Barat yang turut membantu sebagai informan dalam penelitian karya ilmiah ini untuk proses kelanjutan program Strata Satu (S1) dengan dapat diselesaikan sangat baik.

REFERENSI

- A.S., Rosa dan Shalahuddin, M. (2016). *Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur dan Berorientasi Objek*. In *Informatika Bandung*.
- Aji, R. (2016). DIGITALISASI, ERA TANTANGAN MEDIA (Analisis Kritis Kesiapan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Menyongsong Era Digital). *Islamic Communication Journal*, 1(1), 43–54. <https://doi.org/10.21580/icj.2016.1.1.1245>
- Denis, W. (2009). *System Analysis and Design with*.
- Donni, J. (2015). *administrasi dan operasional perkantoran*.
- Isyryn, M. (2019). DIGITALISASI PAJAK DI INDONESIA DAN TANTANGAN PENERAPANNYA DALAM MASYARAKAT.
- Latief, S., Junaidin Zakaria, & Mapparenta. (2020). Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak dan manfaat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(3), 271–289. <http://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/CESJ/article/view/581/425>
- Rahayu, S., & Lingga, I. S. (2009). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Atas Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Bandung "X"). *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 119–138. <https://doi.org/10.28932/jam.v1i2.375>
- Sedianingsih, F. (2010). *Teori dan Praktik Administrasi kesekretariatan*.
- Sofiyana, R. L. S., Hamid, D., & Riza, M. F. (n.d.). PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATU.
- Wardhani, R. S., Yogama, E. A., & Winiati, E. (2020). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak, dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Penanganan Dampak Covid-19. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 1–17.